



PERBARINDO

DEWAN PENGURUS PUSAT

PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT INDONESIA

TANDA TERIMA

No.2077/GCG/DPP-PERBARINDO/V/2025

Kepada Yth,

PT BPR MITRA BALIJAYA MANDIRI

Jl. Raya Kesambi 103 X Kerobokan Kuta Badung - Bali

KETERANGAN

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2024 dari PT BPR MITRA BALIJAYA MANDIRI dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 06 Mei 2025

PERBARINDO

TANDA TERIMA

No.2077/GCG/Media-BPR/V/2025

Kepada Yth,

PT BPR MITRA BALIJAYA MANDIRI

Jl. Raya Kesambi 103 X Kerobokan Kuta Badung - Bali

KETERANGAN
Majalah MediaBPR-Perbarindo, telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2024 dari PT BPR MITRA BALIJAYA MANDIRI dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 06 Mei 2025

MediaBPR-PERBARINDO

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA**

**PT. BPR MITRA BALIJAYA MANDIRI
TAHUN 2024**



**JL.RAYA KESAMBI NO. 103X KEROBOKAN
KUTA - BADUNG
TELEPON: 0361 - 8448324 , 0361 - 8448578**



No : 069/MBJM/IV/2025

Kepada Yth :
Ketua Umum DPP Perbarindo dan Media BPR
Komp.Patra No 46 Ahmad Yani Bypass Cempaka Putih
Jakarta Pusat

Perihal : Laporan Pelaksanaan Tata Kelola/ Good Corporate Governance PT. BPR Mitra
Balijaya Mandiri Tahun 2024

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan
Tata Kelola Bagi BPR, bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola/ Good
Corporate Governance PT. BPR Mitra Balijaya Mandiri Tahun 2024

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih.

Badung, 30 April 2025

Hormat kami,

PT. BPR Mitra Balijaya Mandiri


Cokorda Gede Wina Arta, SE
Direktur Utama



A.A.Sg Oka Suwiryani, SH
Direktur



No. : 030/MBJM/OJK/IV/2025

Kepada :
Yth. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan
Propinsi Bali
JL. W R supratman No. 1
Denpasar

Perihal : Laporan Tahunan PT. BPR Mitra Balijaya Mandiri Tahun 2024

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR dan SEOJK No. 16/SEOJK.03/2024 tentang Pelaporan dan TTK BPR, maka dengan ini kami kirimkan Laporan Tahunan PT. BPR Mitra Balijaya Mandiri Tahun 2024

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Badung, 30 April 2025

Hormat kami,

Cokorda Gede Punia Arta
Direktur Utama

A A Sg Oka Suwiryani
Direktur

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Baliyaya Mandiri

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

933124-1-LTBPRK-R-A-20241231-010201-601853-04052025234047

Periode Data

2024

User ID Petugas Pelaporan

mitrajayakuta@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-05-04 23:40:47



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT. BPR Mitra Balijaya Mandiri
Alamat	Jl. Raya Kesambi No 103x Kerobokan, Kuta Utara Badung
Nomor Telepon	03618448324

Penjelasan Umum:

Tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance "GCG") merupakan sistem dan proses untuk mengarahkan dan mengendalikan operasional BPR agar berjalan secara sehat dan transparan. BPR wajib menerapkan prinsip-prinsip GCG yang meliputi keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas bisnis. Tata kelola yang baik menjadi kunci keberlanjutan BPR di tengah persaingan dan pengawasan ketat dari regulator. Penerapan prinsip GCG tidak hanya menjaga kesehatan bank, tapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai nasabah dan mitra bisnis. PT. BPR Mitra Balijaya Mandiri wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan perdemonan pada prinsip-prinsip GCG.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik
--	----------------

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Berdasarkan nilai komposit yang dihasilkan bahwa BPR menerapkan Tata Kelola yang baik yang terlihat dari laporan yang disajikan secara transparan atau terbuka kepada pemangku kepentingan, pengelolaan BPR sesuai dengan peraturan dan standar tata kelola yang berlaku, menjalankan prinsip akuntabilitas yaitu manajemen bertanggungjawab atas keputusan dan kinerjanya, pengelolaan yang independensi yaitu dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan yang dilihat dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian dijalankan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1. Nama	COKORDA GEDE PUNIA ARTA, S.E.
---------	--------------------------------------

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, Merealisasikan pencapaian target Kinerja



Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank, Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya, Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau Otoritas Lainnya, Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai

2. Nama

A.A. SAGUNG OKA SUWIRYANI, S.H.

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara professional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, menetapkan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang, memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain, memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan peraturan perundang-undangan, menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan, dan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

- a. Pemberian remunerasi akan dilakukan perbaikan agar bisa menunjang bisnis BPR;
- b. Peran Audit Internal sudah dimaksimalkan ke semua bidang termasuk ke Fungsi Kepatuhan dan APU PPT;
- c. Assement dan Stresstest berkala sudah dilakukan kepada debitur yang mendapatkan Relaksasi Covid;

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1. Nama

I MADE ASTRAMA, S.E.,M.M.

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank, Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan, dan Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Audit eksternal dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Institusi lainnya.



2.	Nama	I KETUT KERTA, S.H.
----	------	----------------------------

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank, Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan, dan Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audt dan rekomendasi dari Audit Internal, Audit eksternal dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Institusi lainnya.

Rekomendasi Kepada Direksi:

- a. Peninjauan kembali sistem remunerasi SDM yang diterapkan.
- b. Pengawasan yang melekat secara rutin.
- c. Meningkatkan fungsi Audit Internal di berbagai bidang.
- d. Penunjukan petugas IT.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	COKORDA GEDE PUNIA ARTA, S.E.
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	A.A. SAGUNG OKA SUWIRYANI, S.H.
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	I MADE ASTRAMA, S.E.,M.M.
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	I KETUT KERTA, S.H.
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR



1.	Nama	COKORDA GEDE PUNIA ARTA, S.E.
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	A.A. SAGUNG OKA SUWIRYANI, S.H.
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	I MADE ASTRAMA, S.E.,M.M.
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	I KETUT KERTA, S.H.
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	COKORDA GEDE PUNIA ARTA, S.E.
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	A.A. SAGUNG OKA SUWIRYANI, S.H.
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00



Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	I MADE ASTRAMA, S.E.,M.M.
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	I KETUT KERTA, S.H.
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	COKORDA GEDE PUNIA ARTA, S.E.
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	A.A. SAGUNG OKA SUWIRYANI, S.H.
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	I MADE ASTRAMA, S.E.,M.M.
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada



	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	I KETUT KERTA, S.H.
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	I MADE ASTRAMA,SE.,MM.
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	I KETUT KERTA, SH.
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

11. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
------------------------------	----------------



Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp301.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp126.400.000

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp85.049.180
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp31.629.200

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp41.356.000
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp18.928.000

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris	Rp0



(Rp)

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp14.400.000



2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp11.520.000
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp5.544.000

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b)	2,88 : 1
-------------	-----------------

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b)	1,33 : 1
-------------	-----------------

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b)	1,45 : 1
-------------	-----------------



4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b) **2,30 : 1**

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b) **2,85 : 1**

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1. Tanggal Rapat **15 Januari 2024**

Jumlah Peserta **4 orang**

Topik/Materi Pembahasan:

evaluasi kinerja perusahaan periode Desember 2023, evaluasi RBB periode Desember 2023, pembahasan hasil temuan audit internal, Kebijakan strategis dan isu strategis

2. Tanggal Rapat **19 April 2024**

Jumlah Peserta **4 orang**

Topik/Materi Pembahasan:

evaluasi kinerja perusahaan periode Maret 2024, evaluasi RBB periode Maret 2024, pembahasan hasil temuan audit internal, Kebijakan strategis dan isu strategis

3. Tanggal Rapat **12 Juli 2024**

Jumlah Peserta **4 orang**

Topik/Materi Pembahasan:

evaluasi kinerja perusahaan periode Juni 2024, evaluasi RBB periode Juni 2024, pembahasan hasil temuan audit internal, Kebijakan strategis dan isu strategis

4. Tanggal Rapat **17 Oktober 2024**

Jumlah Peserta **4 orang**

Topik/Materi Pembahasan:

evaluasi kinerja perusahaan periode September 2024, evaluasi RBB periode September 2024, pembahasan hasil temuan audit internal, Kebijakan strategis dan isu strategis

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun



1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	I MADE ASTRAMA, S.E.,M.M.
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	I KETUT KERTA, S.H.
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada	0 kasus



Tahun Laporan	
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus



Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR MITRA BALIJAYA MANDIRI untuk tahun 2024. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Badung, 30 April 2025

PT. BPR MITRA BALIJAYA MANDIRI